

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN: PERSPEKTIF VALUE FOR MONEY

Erly Putri Mandasari  
*erlyputri90@gmail.com*  
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out the presentation of performance accountability statement on the Environmental Agency in Pasuruan district based on the guideline regulations of State Minister for the Empowerment of State Apparatus Bureaucratic Reform Nomor 29 of 2010 and to evaluate the performance of Environmental Agency which is reflected on the performance statement by using the value for money approach. This research has been prepared by using qualitative descriptive method. The result of the discussion and the analysis shows that the performance accountability statement of Environment Agency in Pasuruan district in 2014 has been presented in accordance with the guideline regulations of State Minister for the Empowerment of State Apparatus Bureaucratic reform Nomor 29 of 2010. The performance of the institution has been running well, but there are some results of implementation programs which have not been achieved optimally. The Environment Agency in Pasuruan district in determining the economic performance is done by considering the input to the market prices. The efficiency of the performance can be seen from the realization of the output which has been generated to the input which is budget. The performance effectiveness can be known from the output and outcome which has successfully run well the institution goals, so the relevance of output and outcome indicators is required to be developed by considering its relevance with the goals and activities of the program. Although the Environment Agency's performance Pasuruan are presented in the performance already demonstrated by the plan nevertheless necessary to develop indicators of value for money that was relevant to the purpose of the implementation of programs and activities.*

**Keywords:** *Performance and Accountability Report of Government Agencies (LAKIP), Value for Money, Economic, Efficiency, Effectiveness.*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 serta mengevaluasi kinerja Badan Lingkungan Hidup yang tereflesi pada laporan kinerja dengan pendekatan *value for money*. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan laporan akuntabilitas kinerja badan lingkungan hidup kabupaten pasuruan tahun 2014 telah disajikan sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010. Kinerja instansi berjalan dengan baik, namun masih ada hasil pelaksanaan program yang belum dicapai secara optimal. Badan lingkungan hidup kabupaten pasuruan dalam menentukan kinerja ekonomi mempertimbangkan *input* dengan harga pasar. Kinerja efisien terlihat dari jumlah realisasi *output* yang dihasilkan terhadap *input* yaitu anggaran. Kinerja yang efektif dapat dilihat dari pencapaian *output* dan *outcome* dalam menjalankan tujuan instansi, sehingga relevansi indikator *output* dan *outcome* perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan relevansinya tujuan program dan kegiatan. Meskipun kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang disajikan dalam laporan kinerja sudah menunjukkan sesuai dengan rencana namun demikian perlu dikembangkan indikator *value for money* yang relevan dengan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan.

**Kata Kunci :** *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Value for money, ekonomi,efisien,efektivitas.*

## PENDAHULUAN

Kinerja instansi pemerintah kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemudian diganti dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Dalam konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Mahmudi, 2007: 9). Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilaksanakan organisasi publik.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah menggunakan kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan. Pengukuran kinerja adalah faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai gambaran pencapaian suatu kegiatan, program, kebijaksanaan serta fungsi-fungsi organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi sektor publik. Hal penting lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan publik adalah sejauh mana pemerintah mengelola fungsi-fungsi tersebut, sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa yang efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel. Salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja pemerintah yang digunakan oleh penulis adalah mengukur hubungan antara *input*, *output*, *outcome* sehingga kita dapat melihat efektifitas dari kinerja yang telah dilakukan. Diharapkan dengan pengukuran kinerja melalui metode *value for money* ini dapat membantu dalam peningkatan kinerja yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

Penelitian pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa penerapan *Value for Money* dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien (Arfan, 2014). Begitu juga dengan penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji menyatakan bahwa penggunaan *value for money* sebagai alat ukur kinerja yang lebih komprehensif sangatlah memungkinkan diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dengan mencoba menetapkan target untuk masing-masing komponen yang akan diukur kemudian melakukan penilaian apakah telah dicapai atau sudah mendekati atau tidak sama sekali. Dari penerapan *value for money* pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji ternyata dapat memperlihatkan bahwa peningkatan pada perspektif non keuangan mampu mendorong peningkatan pada perspektif keuangan (Naim, 2013).

Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang memiliki tugas mewakili pemerintah dalam melayani masyarakat sehingga diperlukan berbagai program yang mendukung. Banyak dari program yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang mempunyai

dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat, selain itu perlu adanya evaluasi pada program yang telah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan agar hasil yang dicapai pada program yang akan datang dapat meningkat. Dalam hal ini salah satu alat yang dapat digunakan sebagai pertanggung jawaban kinerja adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 pasal 12 menyatakan Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media utama yang menuangkan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat umum ini perlu adanya akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas yang baik, memadai, tertib, dan teratur sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah juga diharapkan membantu pimpinan tertinggi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan mandat atau kewenangannya kepada masyarakat atau publik melalui lembaga perwakilan. Instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk mengetahui kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang diukur dengan menggunakan metode Value For Money sebagai evaluasi agar pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerjanya dimasa yang akan datang. Berkaitan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan peneliti adalah: (1) Bagaimana Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)? (2) Bagaimana penggunaan value for money tereflesi dengan laporan kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan?

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan pembahasan dilanjutkan dengan mengevaluasi kinerja Badan Lingkungan Hidup yang tereflesi pada laporan kinerja dengan pendekatan *value for money*.

## TINJAUAN TEORITIS

### Pengertian Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan. Tetapi berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial mencari laba, sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba) (Deddi, 2009: 1)

### Karakteristik Organisasi Sektor Publik

Menurut Bastian (2006: 4) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani (2) Melakukan aktivitas pelayanan publik (*public services*) seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dalam penyediaan pangan (3)

Sumber pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (4) Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (5) Kultur Organisasi bersifat birokratis, formal, dan berjenjang (6) Penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan akibatnya, disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, dan DPRD

### **Pengertian Kinerja**

Menurut Mahsun, dkk (2007: 157), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2006: 274). Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil kinerja suatu instansi dan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

### **Pengukuran Kinerja**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja suatu organisasi perlu dilakukan adanya pengukuran seluruh aktivitas yang dilakukan dalam organisasi tersebut. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk info atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan) hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam pencapaian tujuan (Robertson, 2002 dalam Mahsun, 2006: 25).

Menurut Mardiasmo dan Ulum (2002, 2004) menyatakan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Sementara itu menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

### **Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja**

Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2002: 122) yaitu sebagai berikut: (1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, (2) Untuk mengukur kinerja *financial* maupun *non-financial* secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi, (3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence* (keselarasan

tindakan dalam pencapaian tujuan organisasi), (4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

### **Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik**

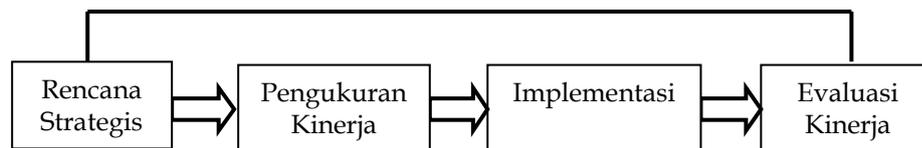
Pengukuran kinerja sangat penting untuk mengukur akuntabilitas dan manajer dalam memutuskan dan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar menunjukkan kemampuan bagaimana uang publik dibelanjakan tetapi meliputi kemampuan dalam menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif dan efisien.

Menurut Mardiasmo (2002: 122) berikut ini manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal dan eksternal organisasi sektor publik yaitu: (1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen (2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan (3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja (4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati (5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi (6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi (7) Membantu pemahaman proses kegiatan instansi pemerintah (8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

### **Elemen Pengukuran Kinerja**

Menurut Mahsun (2006: 26) dalam pengukuran kinerja sektor publik terdapat beberapa elemen, yaitu : Pertama, Menetapkan Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi, Tujuan yang dimaksud adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Sedangkan sasaran merupakan pencapaian tujuan organisasi yang disertai dengan batasan waktu tertentu. Kemudian strategi adalah cara atau teknik yang digunakan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Kedua, Merumuskan indikator dan Ukuran Kinerja, Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Indikator kinerja dapat berbentuk keberhasilan utama atau indikator kunci. Keberhasilan utama ini adalah dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial maupun non finansial pada kondisi waktu tertentu. Kemudian indikator kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non finansial. Sedangkan ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Ketiga, Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-sasaran Organisasi, Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Dalam analisis ini dapat menghasilkan penyimpangan positif yaitu : (a) Penyimpangan Positif yaitu pelaksanaan kegiatan sudah berhasil atau melampaui indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan (b) Penyimpangan Negatif yaitu pelaksanaan kegiatan belum mencapai indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan (c) Penyimpangan Nol yaitu pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai atau sudah sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Keempat, Evaluasi Kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Informasi pencapaian kinerja dapat dijadikan: (a) Feedback adalah Hasil dari pengukuran atas pencapaian kinerja digunakan manajemen atau pengelola organisasi untuk memperbaiki kinerjanya pada periode selanjutnya. Selain itu juga sebagai salah satu alasan dalam pemberian *reward and punishment* terhadap manajer dan anggota organisasi. (b) Penilaian Kemajuan Organisasi yaitu Pengukuran kinerja yang dilakukan pada periode tertentu sangat bermanfaat untuk

menilai kemajuan yang telah dicapai oleh suatu organisasi. Dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan organisasi. Apabila dalam suatu periode, kinerja yang dicapai lebih rendah daripada periode sebelumnya, maka perlu diidentifikasi dan menemukan sumber penyebabnya serta mencari solusinya. (c) Meningkatkan Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan dan Akuntabilitas, Dalam pengukuran kinerja ini dapat memberikan informasi yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan manajemen maupun *stakeholders*. Selain itu informasi pengukuran kinerja mampu menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola dan mengurus suatu organisasi serta membantu dalam pengambilan keputusan yang bersifat ekonomis dan strategis.



Sumber : Mahsun (2006:29)

**Gambar 1**  
**Skema Pengukuran Kinerja**

### Aspek-aspek Pengukuran Kinerja

Menurut (mahsun, 2007: 32) dalam pengukuran Kinerja menggunakan metode *value for money*, terdapat aspek-aspek pengukuran kinerja yang terdiri atas : (1) Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. (2) Kelompok proses (*proses*) adalah ukuran kegiatan, dari segi kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. (3) Kelompok keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*). (4) Kelompok hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. (5) Kelompok manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang berkaitan dengan tujuan akhir pelaksanaan kegiatan. (6) Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

### Indikator Kinerja Sektor Publik

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja menurut (Bastian, 2006 : 267) adalah : (1) Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. (2) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama. (3) Relevan indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan. (4) Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak. (5) Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. (6) Efektif data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi, dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi (BPKP, 2007).

## Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Inpres 7: 1999). Menurut Mahsun (2006: 83) dalam pengertian yang sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab. Sedangkan dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemberi amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Adapun menurut (Rasul, 2002: 11) Dimensi akuntabilitas ada 5 yaitu : Pertama, Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*) terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. Kedua, Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Ketiga, Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Keempat, Akuntabilitas kebijakan Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

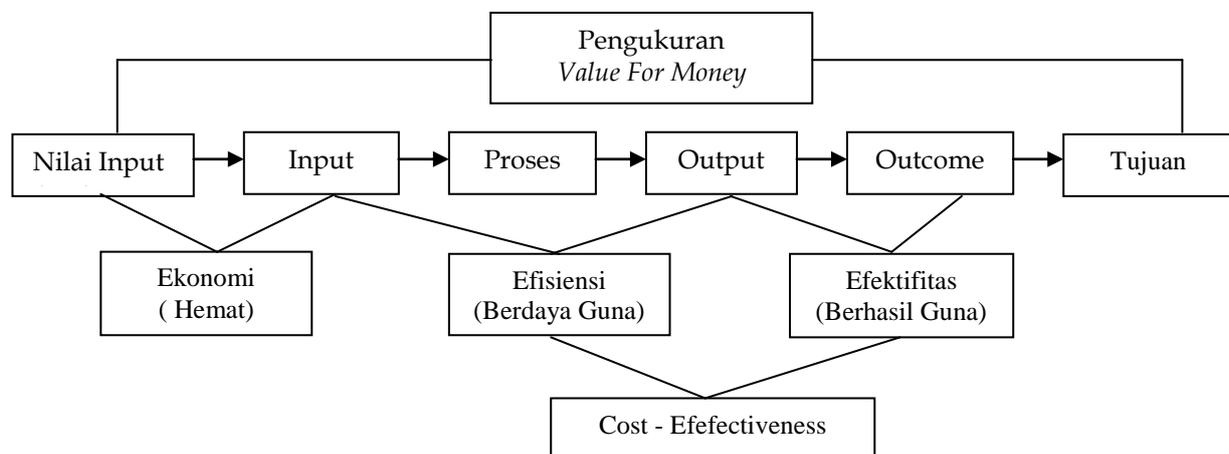
Kelima, Akuntabilitas financial merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

## Value For Money

Menurut Mahmudi (2005: 89) pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009: 4) *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, di mana pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah: Pertama, ekonomi yaitu terkait dengan penggunaan input primer berupa anggaran atau kas menjadi input reguler berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk pelaksanaan kegiatan operasional organisasi. Konsep ekonomi terkait

dengan penghematan anggaran untuk memperoleh input. Konsep ekonomi menghendaki organisasi sektor publik tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan operasional organisasi. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh secara hemat yaitu dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) atau lebih murah dengan kualitas tertentu. Kehematan harga biasanya diukur dengan harga pasar. Ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan nilai (anggaran).

Kedua, efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* di mana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu (Indra Bastian, 2006: 280). Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009: 4). Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan kata lain output per unit input. Ketiga, efektifitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Suatu kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).



Sumber : Mardiasmo (2002:132)

**Gambar 2**  
**Pengukuran Kinerja Value For Money**

### **Manfaat Implementasi Value for Money**

Penerapan konsep *Value for Money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *Value for Money* pada organisasi sektor publik yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya, dan efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo 2009: 130). Manfaat lain dari implementasi konsep *Value for Money* antara lain: (1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran (2) Meningkatkan mutu pelayanan public (3) Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input* (4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik (5) meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. *Value for money* dapat membantu pihak manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik karena pengukuran kinerja *value for money* memberikan informasi yang dapat membentuk fungsi-fungsi pengendalian serta mendorong tanggung jawab manajer dalam melaksanakan fungsi akuntabilitas.

### **Langkah-langkah Perencanaan dan Pengukuran Kinerja VFM**

Manajemen kinerja terintegrasi terdiri atas dua bagian utama, yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Menurut (Mardiasmo, 2002: 11) Perencanaan kinerja terdiri atas empat tahap, yaitu: (1) Penentuan visi, misi, dan tujuan, serta strategi (2) Penerjemahan visi, misi, dan tujuan, serta strategi ke dalam (3) Penyusunan program (4) Penyusunan anggaran Sementara itu, kerangka pengukuran kinerja *value for money* dibangun atas tiga komponen utama, yaitu: (1) Komponen visi, misi, tujuan, sasaran dan target (2) Komponen input, proses, output dan outcome (3) Komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

### **Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah**

Sama halnya dengan pemerintah pusat, laporan keuangan untuk lingkup pemerintah daerah meliputi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan laporan konsolidasi dari seluruh laporan keuangan SKPD yang disusun dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Menurut (Mahmudi, 2011: 79) Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) meliputi : (a) Neraca Pemerintahan Daerah (b) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (c) Laporan Operasional (LO) (d) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) (e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) (f) Laporan Arus Kas (LAK) (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah : (a) Neraca SKPD (b) Laporan Realisasi Anggaran SKPD (c) Laporan Operasional SKPD (d) Catatan Atas Laporan Keuangan. Format laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) hampir sama dengan format Laporan Keuangan Pemerintah pusat (LKPP) , yang membedakan hanyalah pada beberapa elemen atau komponen aset pada neraca, pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas, sedangkan format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Ekuitas sama untuk pemerintah pusat dan daerah.

Pada saat ini, Menteri Dalam Negeri berusaha mengembangkan suatu indikator yang mampu menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan otonomi dan desentralisasi fiskal. Indikator tersebut mencakup empat fungsi yaitu perencanaan dan pemrograman, mobilisasi sumber daya, manajemen dan penganggaran, desain dan implementasi proyek. Usaha tersebut di atas berkelanjutan dengan adanya inpres no 7 tahun 1999 yang mengharuskan eselon II ke atas untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang kemudian dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP). Eselon II dan yang lebih tinggi diharuskan untuk menyusun indikator, metode, dan mekanisme pelaporan atas kinerja instansi pemerintahannya. Namun demikian, masih banyak kendala terutama pada teknis pelaksanaannya.

Aturan baru yang berkaitan dengan masalah pengukuran kinerja antara lain UU No.32 tahun 2004, UU No.33 tahun 2004, PP No.58 tahun 2005, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, beberapa peraturan tersebut mengharuskan Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari Laporan Perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, Laporan Aliran Arus Kas, dan Neraca Daerah yang didasarkan pada pengukuran kinerja berbasis rencana strategik. Adapula aturan terbaru yang berkaitan dengan masalah pengukuran kinerja yaitu PP No.8 tahun 2006 yaitu tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem yang membahas tentang kinerja instansi pemerintahan adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, dan pelaporan kinerja. (1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menurut inpres 7 (1991) Lakip adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah juga merupakan bentuk implementasi dari SAKIP. Untuk Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, instansi pemerintah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah suatu unit kerja pemerintah yang diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengelola sendiri administrasi dan keuangan. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun.

Dalam pelaporannya LAKIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat mengintegrasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien, sesuai kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 29 tahun 2010, menjelaskan tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi yang bersangkutan.

Di dalam pasal 16 ayat 1 menjelaskan tentang laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang: (a) Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi (b) Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi (c) Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan (d) Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahunan yang direncanakan. (3) Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-masing instansi pemerintah. Format LAKIP ini dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan isi dan cara penyajian yang dimuat dalam LAKIP sehingga memudahkan perbandingan ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan. Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut: Pertama, Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang. Kedua, pendahuluan pada bagian ini menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LAKIP dan juga gambaran umum struktur organisasi serta sistematika penulisan.

Ketiga, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana strategik, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Keempat,

Akuntabilitas Kinerja, pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran serta analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi. Kelima, Penutup mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan sarana-sarana yang diperlukan untuk langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Keenam, Lampiran-Lampiran, berisi tabel-tabel yang memuat Rencana Strategis (RS), Penetapan Kinerja atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian**

Penelitian diselesaikan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Moh Nazir, 2011:54). Obyek penelitian yang diamati penulis adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang beralamatkan di Jl Patimura No. 223 Pasuruan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini Studi lapangan adalah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Studi Lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung ditempat riset yang akan diteliti, dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Adapun cara memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut : Pertama, observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ditempat riset yang akan diteliti, dalam arti peneliti secara langsung melihat atau mengamati apa yang terjadi pada objek penelitian. Dan yang dimaksud objek dalam penelitian ini adalah LAKIP Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

Kedua, dokumentasi yaitu mencatat dan mengumpulkan data berupa dokumen yang berkaitan dengan objek dan tujuan yang akan diteliti, yaitu data tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Ketiga, wawancara/interview yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden, dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung atau yang berwenang menangani permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh informasi atau keterangan lengkap.

### **Satuan Kajian**

Satuan kajian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: Pertama, Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta dampak yaitu dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan

jumlah atau persentase. Manfaat yang didapat dari penyusunan suatu LAKIP yaitu evaluasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap instansinya sendiri sehingga pimpinan instansi tersebut dapat mengevaluasi kinerja dari instansi yang dipimpinnya selama 1 tahun anggaran. Kedua, Kinerja Ekonomi Merupakan pengukuran kinerja yang mempertimbangkan antara masukan (*input*) dan harga pasar, untuk mengukur seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan. Ketiga, Kinerja Efisiensi Merupakan pengukuran kinerja yang membandingkan antara masukan (*input*) yang digunakan terhadap keluaran (*output*) yang dihasilkan. Keempat, Kinerja Efektivitas merupakan pengukuran kinerja yang menghubungkan antara keluaran (*output*) dan tujuan atau sasaran yang akan dicapai (*outcome*).

### **Teknik Analisis Data**

Tahapan Penganalisaan data adalah sebagai berikut : (1) Untuk menganalisa ekonomi, efisiensi dan efektifitas kinerja menggunakan perbandingan antara data Satuan Kinerja Pemerintah Daerah dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Penganalisaan data dimulai dengan evaluasi penetapan pengukuran kinerja dengan tahapan sebagai berikut: (a) Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa visi dan misi Dinas Pendidikan kota Surabaya (b) Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.

Langkah - langkah dalam merumuskan indikator dan ukuran kinerja adalah sebagai berikut: Pertama, menuliskan tujuan atau *outcome* yang diharapkan dengan jelas untuk mengembangkan indikator kinerja yang baik. Kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan keterkaitan antara *outcome* yang diharapkan dengan *output* yang dihasilkan unit kerja. Ketiga, memastikan bahwa indikator kinerja kunci telah ditentukan dan mendapat persetujuan manajemen. Keempat, menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada budaya berprestasi untuk mencapai tujuan organisasi, evaluasi diri, pelibatan dan partisipasi pegawai serta keterbukaan dalam berkomunikasi. Kelima, memperkerjakan orang yang memiliki keahlian memadai untuk mengembangkan indikator yang memuaskan. Keenam, memastikan bahwa tujuan berfokus pada kebutuhan pelanggan dan *outcome* yang diharapkan. Ketujuh, menggunakan indikator kinerja untuk perencanaan kinerja dan manajemen kinerja pada level strategik dan operasional. (c) Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. (d) Evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas). (2) Mengevaluasi pelaporan kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi pelaporan kinerja, dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian yang membahas tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk menilai ekonomi, efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan kinerja instansi pemerintah, maka berikut terdapat data-data terkait kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan data-data tersebut dapat dianalisis kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selama tahun 2014. Secara keseluruhan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah dapat melaksanakan pelayanan (umum sesuai tupoksi), baik kegiatan yang bersifat administrasi ketatausahaan maupun yang bersifat teknis. Untuk menilai keberhasilan Pencapaian sasaran-sasaran program maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Skala ordinal pencapaian sasaran program**

No	Jumlah Capaian Kinerja	Kategori
1	85% sampai dengan 100%	Sangat Berhasil
2	70% s/d kurang dari 85%	Berhasil
3	55% s/d kurang dari 70%	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 55%	Tidak Berhasil

Sumber :Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

Sebagai media pengukuran, skala ini digunakan untuk mengklarifikasi hasil pengukuran indikator kinerja.Meskipun hasil klasifikasi tersebut pada akhirnya menggambarkan keberhasilan dan ketidak keberhasilan pencapaian sasaran, namun pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, tapi sebagai informasi awal yang sangat menentukan bagi pengambil keputusan untuk mebuat langkah-langkah yang solutif dan strategik guna meningkatkan kinerja organisasi

Informasi awal tidak serta merta bisa menciptakan keputusan yang strategik. Masih diperlukan beberapa tahapan analisa dan evaluasi kerja guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan tidak keberhasilan kinerja sehingga manajemen dapat menyimpulkan tentang adanya masalah kinerja guna mendukung pengambilan kebijakan untuk peningkatan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dengan menggunakan skala ordinal, capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Sasaran/program yang dicapai**

Sasaran	Tingkat Keberhasilan
Meningkatnya Kualitas Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.	Sangat Berhasil

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

Analisis dan evaluasi sasaran kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sebagai berikut : Pertama, prosentase luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah. Indikator ini menggambarkan lingkungan permukiman yang berkualitas. Lingkungan yang berkualitas salah satunya harus terjaga kebersihan lingkungannya. Pengukuran kinerjanya didasarkan pada luas areal permukiman yang dilayani pengangkutan sampah dibandingkan luas areal permukiman di Kabupaten Pasuruan. Persentasi luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah pada tahun 2014 seluas 6.672 Ha. Total areal permukiman seluas 21.572 Ha. Jika dibandingkan dengan luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah pada tahun 2014 yang tercapai sebesar 30,93%, Prsentase tahun 2014 meningkat 30,93%. Hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan sarana dan perbaikan fasilitas yang ada sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat yang terkait dengan kebersihan di lingkungan permukiman diwilayah Kabupaten Pasuruan.

Kedua, persentase sampah yang terangkut ke TPA. Indikator ini menggambarkan aktivitas pengendalian lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam urusan pengelolaan sampah. Pengukuran kinerjanya didasarkan pada jumlah volume sampah yang terangkut dibandingkan dengan jumlah volume produksi sampah di Kabupaten Pasuruan. Jumlah sampah yang terangkut pada tahun 2014 sebesar 108.882,04 m<sup>3</sup> (240 m<sup>3</sup>/hari) dari produksi sampah 595.576,8 m<sup>3</sup>. Hal tersebut disebabkan adanya

penambahan peralatan dan pemeliharaan fasilitas yang ada juga tambahan tenaga outsourcing penanganan pengelolaan persampahan, mulai dari pembersihan dan pengangkutan ke tempat penampungan akhir sampah. Penambahan tenaga outsourcing sebanyak 26 orang tahun 2014, tahun 2014 sebanyak 148 orang, dan peralatan antara lain Amroll Truck 15 Unit Rusak 2, Pick Up 6 Unit. Truck Tangki 3 Unit, angkutan sepeda motor sampah 24 Unit, serta masih ada perbaikan kontainer sebanyak 115 Rusak 30 buah. Sehingga dapat meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Pasuruan.

Ketiga, persentase perusahaan yang menggunakan IPAL. Kepemilikan IPAL merupakan indikator ketaatan dan kepedulian dunia usaha Industri dengan membandingkan jumlah perusahaan yang memiliki IPAL. Pada tahun 2014 dari 113 Perusahaan yang disamplingkan seluruhnya (100%) memiliki IPAL. Capaian ini sesuai dengan target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pembinaan pada pengusaha industri sebagai upaya pelestarian Lingkungan Hidup, serta memperlihatkan semakin bertambahnya kesadaran pengusaha terhadap kualitas Lingkungan Hidup.

Keempat, penurunan tingkat pencemaran. Persentase sampel pengujian air, tanah dan udara yang memenuhi baku mutu : (a) Air Badan Air (ABA) yaitu pengambilan sampel dilaksanakan pada 9 DAS di Kabupaten pasuruan, satu Sub DAS atau 22,22 % diantaranya tercemari/tidak memenuhi baku mutu ,pencapaian kinerja indikator tersebut sesuai dengan realisasi penurunan tingkat pencemaran Air Badan Air (ABA) tahun 2014 sebesar 22,22%, maka tidak terjadi penurunan tingkat pencemaran Air Badan Air di Sub DAS Kabupaten Pasuruan pada tahun 2014. (b) Udara yaitu pelaksanaan realisasi pengambilan sampel udara pada tahun 2014 mencapai 25 titik sampel. Hasil uji sebanyak uji sampel sebanyak 15 titik atau 60% memenuhi syarat standar baku mutu yang ditentukan. (c) Limbah Cair yaitu pelaksanaan realisasi pengambilan sampel Air Limbah Industri (ALI) pada tahun 2014 mencapai 29 titik sampel atau 70,73% yang melampaui standart baku mutu dari jumlah yang ditargetkan sebanyak 41 titik sampel. (d) Limbah Padat/sludge yaitu pelaksanaan realisasi pengambilan sampel untuk uji kualitas tanah pada tahun 2014 mencapai 4 titik atau 100% dari target yang ditetapkan 100%. Pelaksanaan realisasi pengambilan sampel untuk uji kualitas tanah pada tahun 2013 mencapai 3 titik atau 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 3 titik sampel jika dibandingkan dengan hasil uji sampel tahun 2014 ada kenaikan satu titik sampel dan 100% memenuhi syarat baku mutu.

Kelima, persentase jumlah perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL. Indikator kinerja ini diperoleh melalui perbandingan jumlah perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL dengan jumlah perusahaan yang ada. Dari 617 perusahaan yang ditargetkan ternyata 636 perusahaan atau 103,07% memiliki dokumen UKL-UPL, maka ada kenaikan jumlah perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL sebanyak 19 perusahaan. Keenam, Persentase jumlah perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL. Persentase jumlah perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL diperoleh dengan membandingkan antara jumlah perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL dengan jumlah perusahaan yang seharusnya memiliki dokumen AMDAL. Jumlah yang memiliki dokumen AMDAL tahun 2013 mencapai 53 perusahaan atau 100% dari jumlah perusahaan yang harus memiliki dokumen AMDAL sebanyak 53 perusahaan. Capaian kinerja tahun 2013 ini sama dengan capaian kinerja tahun 2014 yang mencapai 100%. Dari sisi jumlah perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL tahun 2013 sebanyak 53 perusahaan naik 3 (tiga) perusahaan atau 3% menjadi 55 perusahaan di tahun 2014.

Berdasarkan capaian indikator sasaran di atas, maka sasaran 1 (satu) Urusan Lingkungan Hidup, yaitu Meningkatnya kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, menghasilkan capaian sebesar 93,13% dan termasuk dalam kategori Sangat Berhasil.

## **Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan**

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Oleh karena itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menyajikan LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pemberi amanah dalam hal ini bupati pasuruan dan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku "*stake holder*" utama wilayah kabupaten pasuruan, maka badan lingkungan hidup kabupaten pasuruan membuat LAKIP. Sebagaimana juga diutarakan oleh AK, selaku Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

"LAKIP merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kepada seluruh stake holder yang berkepentingan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan."

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat pendorong dalam terwujudnya *good governance*, dan alat penilai kualitas kinerja. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan SI selaku kasubid pengawasan dan pengelolaan lingkungan badan lingkungan hidup kabupaten pasuruan :

"Setiap kinerja harus memiliki alat ukur dan kendali, LAKIP merupakan alat ukur kinerja kita yang digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan."

Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerjanya menurut Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 29 tahun 2010. Dimana di dalam pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dan pelaporan kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan di dalam pengukuran kinerja kegiatan sudah memuat tentang indikator program, target, realisasi serta cakupan pencapaian sasarnya sehingga dapat dilihat kinerja yang dicapai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Dan di dalam Pasal 16 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 29 tahun 2010 berisi tentang sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja di ilustrasikan pada Lampiran IV.

Format penyusunan LAKIP pada badan lingkungan hidup kabupaten pasuruan yang telah diuraikan berisikan tentang program dan kegiatan, rencana input dan realisasi input (sumber daya keuangan), output, outcome, serta penilaian terhadap capaian kinerja selama tahun 2014. Pedoman yang terdapat pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 29 tahun 2010 sudah sesuai dengan yang ada di dalam laporan kinerja badan lingkungan hidup kabupaten pasuruan, hal ini akan memudahkan *stakeholder* membaca dan memahami adanya sumber daya keuangan (*input*) yang digunakan untuk melakukan kegiatan dalam mencapai keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*),serta dampak dari *outcome*.

Akuntabilitas kinerja organisasi tidak terlepas dari evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan manager publik dalam melaksanakan kegiatan dan fungsi yang diamanahkan kepadanya

sebagaimana visi dan misi organisasi. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang di hadapi oleh badan lingkungan hidup kabupaten pasuruan tampak dari pernyataan AK:

“Dalam penyusunan LAKIP terdapat hambatan yang dihadapi oleh BLH antara lain tidak tercapainya target program yang telah ditetapkan hal tersebut disebabkan oleh tidak rasionalnya target, misalnya target pengukuran kualitas lingkungan sehingga tidak terdapatnya data yang diperlukan untuk menyusun LAKIP.”

Apabila ditinjau dari tabel laporan akuntabilitas keuangan yang disajikan sebelumnya, terdapat hasil perhitungan antara rencana/target dan realisasi anggaran. Anggaran tersebut terdapat sisa sebesar Rp. 5.585.885.005,00. Besaran dana yang tidak terpakai bukan berarti bahwa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan belum bisa menggunakan dana tersebut secara maksimal namun ada beberapa sub item kegiatan yang memang belum bisa terealisasi serta adanya efisiensi penggunaan anggaran pada sub item tersebut. Semua sisa anggaran nantinya akan dikembalikan secara otomatis ke kas Pemerintah Kabupaten.

Namun jika dilihat dari sisi peneliti yang telah melakukan penelitian pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, LAKIP yang disajikan badan lingkungan hidup, belum dapat menggambarkan secara jelas tentang sumber daya keuangan (*input*) yang digunakan untuk melakukan kegiatan dalam mencapai keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*),serta dampak dari *outcome*. Karena pada dasarnya Pengukuran kinerja pada organisasi organisasi sektor publik tidak hanya berdasarkan pada ukuran finansial saja tetapi juga pada ukuran non-finansial karena tujuan utama organisasi ini bukan memperoleh laba melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja organisasi sektor publik yang bersifat multidimensional menyebabkan tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja. Selain itu, *output* yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik umumnya bersifat *intangibile*, sehingga perlu adanya ukuran non-finansial yang dapat mencerminkan besarnya *output* yang dihasilkan. Relevansi indikator *output* dan *outcome* perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan relevansinya tujuan program dan kegiatan.

### **Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan ditinjau dari Ekonomi**

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan kualitas tertentu pada harga terbaik yang di mungkinkan (*spending less*). Pengukuran kinerja suatu organisasi sektor publik akan dikatakan ekonomis apabila dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Kegiatan operasi yang dijalankan secara ekonomis atau hemat adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan tingkat biaya minimal tanpa harus mengorbankan hasil yang ingin dicapai.

Dalam penelitian ini untuk menentukan keekonomisan pada setiap program yang telah ditetapkan oleh badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, penulis melihat dari jumlah anggaran dan realisasi anggaran tahun 2014. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk menentukan keekonomisan dengan membandingkan input primer (dana yang terealisasi) dan input sekunder (tenaga kerja, peralatan, obat-obatan dan lain-lain) (Anisa, 2011). Menurut Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan berdasar tabel dapat di ketahui bahwa kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selama tahun 2014 di tinjau dari segi ekonomi menunjukkan hasil yang relatif baik. Hal ini dapat di lihat pada jumlah realisasi lebih kecil dari jumlah anggaran. Sehingga dinas tersebut dapat mengestimasi jumlah anggaran yang di buat, lebih kecil dari hasil realisasinya. Oleh karena itu dalam memberikan pelayanan di kabupaten pasuruan dapat terealisasi dengan baik, dan dilakukan secara ekonomis atau secara hemat dengan biaya yang minimal, dan merealisasikan program dan kegiatan yang menjadi tujuan dari instansi pemerintah, untuk memberikan pelayanan dari program yang dilaksanakan

dengan baik kepada masyarakat dengan biaya yang rendah. Upaya yang dilakukan oleh badan lingkungan hidup supaya mampu menghasilkan kinerja yang ekonomi misalnya dalam pengadaan barang maupun jasa di badan lingkungan hidup yaitu dengan menentukan standart belanja dan membandingkan dengan standart harga yang ada di pasaran untuk program atau kegiatan yang telah ditetapkan oleh badan lingkungan hidup kabupaten pasuruan. Tampak dari pernyataan IH sebagai kasubag umum dan kepegawaian badan lingkungan hidup :

“Dalam hal penentuan pengadaan barang dan jasa badan lingkungan hidup mengacu pada perpres 70 tahun 2012 sehingga dalam hal penentuan pelaksana kegiatan dapat ditentukan dengan berbagai metode pemilihan yang diperlukan.”

Dalam perpres 70 tahun 2012 disebutkan bahwa dalam penentuan pengadaan barang maupun jasa terdapat banyak metode pemilihan yang dapat dipakai tergantung dari keperluan serta anggaran yang ditetapkan. Dengan demikian dapat dilihat dari tabel pengukuran kinerja kegiatan dikatakan bahwa program dan kegiatan operasi yang telah dijalankan badan lingkungan hidup kabupaten pasuruan pada tahun 2014 berhasil dilaksanakan secara ekonomis atau secara hemat dengan pencapaian yang maksimal ataupun mencapai target tetapi menggunakan biaya yang rendah.

Ditinjau dari sisi aspek ekonomi suatu kinerja organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai *output* (keluaran) yang maksimal. Pada penelitian ini peneliti melihat bahwa dalam mengestimasi jumlah anggaran yang dibuat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dapat mengestimasi jumlah anggaran lebih kecil dari jumlah realisasinya. Namun dalam hal ini keekonomisan tidak hanya dapat dilihat dari jumlah realisasi yang lebih kecil dari jumlah anggarannya saja pengembangan akan *output* (keluaran) juga diperlukan untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang telah ditetetapkan.

### **Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Ditinjau dari Efisiensi**

Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran (*output*). Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain *output per unit input*. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar besarnya. Efisiensi berarti pembelanjaan anggaran secara cermat.

Menurut Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan berdasarkan tabel pengukuran kinerja kegiatan, dapat diketahui bahwa kinerja badan lingkungan hidup kabupaten pasuruan pada tahun 2014 secara keseluruhan dapat dikatakan efisien. Indikator efisien terlihat dari pencapaian atau jumlah realisasi dari indikator keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam mewujudkan kegiatan operasional terhadap indikator masukan (*input*) yang digunakan dalam hal ini adalah anggaran yang sesuai dengan waktu dan target yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan AK :

“Kinerja Dikatakan Efisien apabila dengan dana/anggaran yang ada mampu menyelesaikan target kinerja dan mengasilkan keluaran (*output*) namun sesuai dengan waktu dan target yang sudah ditetapkan.”

Kemampuan badan lingkungan hidup kabupaten pasuruan dalam mewujudkan kegiatan maupun programnya dengan menggunakan anggaran yang tersedia. Dapat dilihat dari salah satu pencapaian kinerja pada program kerjanya yaitu program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh badan lingkungan hidup kabupaten pasuruan untuk mencapai tujuan program dan kegiatan yang sudah ditentukan adalah dengan melakukan koordinasi penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL).

Hasil *output* dari program tersebut adalah Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL, dimana ditargetkan 55 perusahaan, jumlah perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL tahun 2014 sebanyak 55 perusahaan atau 100% dari jumlah yang ditargetkan. Dari kegiatan tersebut diperlukan input berupa sumber daya keuangan atau anggaran. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Rp. 40.000.000,00 sedangkan anggaran yang digunakan untuk pemenuhan kegiatan tersebut hanya Rp. 26.275.000,00 atau dapat dikatakan 65,69% dari penggunaan dana yang dianggarkan. Tampak dalam pernyataan AK:

“Badan Lingkungan Hidup dalam mengukur kinerjanya berdasarkan serapan anggaran yang telah dilaksanakan serta hasil kinerjanya secara umum dapat dilihat dari output kegiatan yang telah dilaksanakan.”

Serapan anggaran dalam hal ini untuk menghasikan output yang maksimal dibutuhkan sejumlah dana yang diperlukan. Walaupun dana yang dipakai tidak semuanya diserap hal itu tidak dapat dibuat acuan bahwa kegiatan itu tidak berjalan dengan baik melainkan dapat melakukan penghematan sehingga kinerja yang dilakukan dapat dikatakan efisien. Dengan demikian dari input yang seminimal mungkin dapat memperoleh hasil output yang maksimal, sehingga output yang dihasilkan pada tahun berjalan yaitu tahun 2014 pada program kerja pengendalian pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup dapat dikatakan efisien.

Ditinjau dari konsep efisiensi suatu kinerja organisasi dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar besarnya atau dapat dilihat dari hubungan antara sejumlah *output* yang dihasilkan dengan *input* yaitu anggaran. Seperti yang sudah diuraikan penulis diatas bahwa kinerja organisasi sektor publik yang bersifat multidimensional menyebabkan tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja. Sehingga pengukuran akan *output* dan *outcome* diperlukan untuk merefleksikan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan mampu mewujudkan tujuan utama dari organisasi ini yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

### **Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Ditinjau dari Efektivitas**

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja kegiatan, menurut Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dapat diketahui bahwa kinerja badan lingkungan hidup kabupaten pasuruan pada tahun 2014 secara keseluruhan dapat dinilai efektif, karena adanya rencana dalam penyusunan program dan kegiatan operasi organisasi sektor publik yang diwujudkan dalam indikator kinerja *output* maupun *outcome* telah berhasil dalam menjalankan tujuan organisasi dalam mencapai dan merealisasi program sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Hal ini tampak dari hasil-hasil kinerja indikator keluaran (*output*), indikator hasil (*outcome*). Sesuai dengan misi dari badan lingkungan hidup kabupaten pasuruan yaitu Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup melalui pengawasan, pengendalian, rehabilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan mengupayakan bentuk kinerja yang maksimal agar pencapaian akan *outcome* terpenuhi dengan tetap memperhatikan anggaran yang tersedia dan memmanagennya agar dapat terlaksana setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dapat diketahui dari pembahasan evaluasi kinerja pada LAKIP Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2014, jika dilihat dalam analisis capaian indikator kinerja mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan hal itu dapat dibuktikan dengan membandingkan kinerja efektivitas yaitu menghubungkan antara keluaran (*output*) dan tujuan atau sasaran yang akan dicapai (*outcome*). Sehingga dapat dikatakan tujuan

maupun program kegiatan badan lingkungan hidup kabupaten pasuruan selama tahun 2014 dikatakan efektif.

Namun jika ditinjau dari konsep efektifitas suatu kinerja organisasi dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena pada dasarnya efektif merupakan hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan kinerja yang akan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan keberhasilan Badan Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan perlu adanya peran masyarakat untuk menilai ke efektifitasan dari pencapaian kinerja organisasi tersebut. Seperti yang sudah dibahas pada penilaian capaian kinerja ditinjau dari aspek efisiensi penulis menyatakan bahwa pengukuran akan *output* dan *outcome* diperlukan untuk merefleksikan kondisi yang sebenarnya. Dengan terwujudnya tujuan utama dari organisasi tersebut maka masyarakatpun dapat merasakan manfaat yang dihasilkan dari kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Menurut Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan pelaporan kinerja yang disusun sudah disajikan sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 29 tahun 2010 dimana di dalam pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Namun fakta yang dijumpai peneliti saat melakukan penelitian pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, BLH Kabupaten Pasuruan belum dapat menggambarkan secara jelas tentang keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*), serta dampak dari *outcome*. Relevansi indikator *output* dan *outcome* perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan relevansinya tujuan program dan kegiatan. (2) Pengukuran kinerja tidak hanya dinilai dari penyajian LAKIP saja, melainkan adanya evaluasi kinerja. Berdasar hasil penelitian pada kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selama tahun 2014 di tinjau dari segi ekonomi menurut Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menunjukkan hasil yang relatif baik. Hal ini dapat di lihat berbagai program yang disiapkan untuk mendapatkan hasil yang ekonomi mampu dijalankan dengan biaya yang minimum namun tidak mengubah standart yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga dinas tersebut dapat mengestimasi jumlah anggaran yang di buat lebih kecil dari hasil realisasinya.

Namun dalam hal ini keekonomisan tidak hanya dapat dilihat dari jumlah realisasi yang lebih kecil dari jumlah anggarannya saja pengembangan akan *output* (keluaran) juga diperlukan untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang telah ditetetapkan. (3) Ditinjau dari efisien berdasarkan evaluasi kinerja pada LAKIP Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, menurut Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dapat diketahui bahwa kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan pada tahun 2014 secara keseluruhan dapat dikatakan efisien. Indikator efisien terlihat dari pencapaian atau jumlah realisasi dari indikator keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam mewujudkan kegiatan operasional terhadap indikator masukan (*input*) yang digunakan dalam hal ini adalah anggaran. Namun menurut peneliti pada pengukuran kinerja pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang ditinjau dari konsep efisiensi pengukuran akan *output* dan *outcome* juga diperlukan guna untuk merefleksikan kondisi yang sebenarnya karena kinerja organisasi sektor publik yang bersifat multidimensional menyebabkan tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja. (4) Ditinjau dari efektivitasnya, Berdasarkan tabel pengukuran kinerja kegiatan, dapat diketahui bahwa kinerja Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan pada tahun 2014 secara keseluruhan dapat dinilai efektif, karena adanya rencana dalam penyusunan program dan kegiatan operasi organisasi sektor publik yang diwujudkan dalam indikator kinerja output maupun outcome telah berhasil dalam menjalankan tujuan organisasi dalam mencapai dan merealisasi program sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Hal ini tampak dari hasil-hasil kinerja indikator keluaran (*output*), indikator hasil (*outcome*). Karena pada dasarnya efektif merupakan hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan kinerja yang akan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Menurut pendapat peneliti untuk mewujudkan keberhasilan Badan Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan perlu adanya peran serta masyarakat untuk menilai ke efektifitasan dari pencapaian kinerja organisasi tersebut. Seperti yang sudah dibahas pada penilaian capaian kinerja ditinjau dari aspek efesiansi penulis menyatakan bahwa pengukuran akan *output* dan *outcome* diperlukan untuk merefleksikan kondisi yang sebenarnya.

## SARAN

Pertama, dalam menghadapi kendala-kendala dalam penyusunan LAKIP, sebaiknya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan mulai memperbaiki target-target yang dianggap tidak rasional dan menghambat dalam memperoleh data sehingga menjadi kendala dalam penyusunan LAKIP agar kegiatan yang telah direncanakan dapat tercapai secara keseluruhan. Kedua, karena dalam penelitian ini peneliti menemukan fakta bahwa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten PASuruan belum dapat menggambarkan secara jelas tentang keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*), serta dampak dari *outcome*. Maka untuk selanjutnya diharapkan relevansi indikator *output* dan *outcome* perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan relevansinya tujuan program dan kegiatan. Ketiga, untuk meningkatkan ekonomi, efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan hendaknya selalu berinovasi agar kegiatan berjalan semakin baik lagi dan mampu mencapai tujuan serta sasaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Keempat, meningkatkan perbaikan kualitas dan mutu SDM Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dengan berbagai pelatihan dan seminar agar kinerja semakin lebih baik lagi, menguasai dan memahami penyajian LAKIP, sehingga dapat menyajikan LAKIP yang lebih sempurna dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan sasaran program kegiatan dapat tercapai. Kelima, Keberhasilan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan program dan target kinerjanya pada tahun 2014 hendaknya dijadikan motivasi bagi jajaran manajemen Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan agar tidak cepat bepuas diri, tetapi sebaliknya untuk lebih meningkatkan kinerjanya secara terus menerus demi terpenuhinya peningkatan pembangunan pada urusan lingkungan hidup. Keenam, Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan merata di setiap daerah, dan terus memberikan kenyamanan bagi masyarakat, karena pentingnya faktor kesehatan lingkungan bagi generasi penerus bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisa. D. 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar melalui pendekatan Value For Money. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin. Makasar.
- Arfann. D. A. 2014. Analisis Value For money dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012. *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Bastian. I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga. Yogyakarta.

- Djawa. I. 2013. Tinjauan terhadap LAKIP pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kota surabaya. *Skripsi*. Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya
- Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mahsun. M. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. BPFY Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Naim. N. 2013. Penerapan Konsep Value For Money dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Rumah Sakit Labuang Baji Kota Makasar. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin. Makasar.
- Rasul. S. 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta. PNRI.
- Republik Indonesia. 1999. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Ulum. I. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar*. Edisi Pertama. UMM Press. Malang